

**ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. BHANDA
GHARA REKSA (PERSERO) DIVRE I MEDAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada
Jurusan Akuntansi Syariah

Oleh :

ZULIANA SAHFIKA LUBIS

NIM : 0502172355



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA
2021**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

“Analisis Perhitungan Pemotongan Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan

Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan”

Oleh:

Zuliana Sahfika Lubis

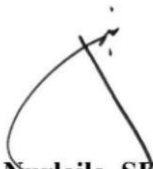
NIM : 05.02.17.23.55

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, SE, MA, CMA

NIDN. 2021057503

Pembimbing II



Nursalmi Yanti, M.E.I

NIDN. 2128059002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA

NIDN.2001077903

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Assalamu'alaikum wr. wb , segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala haturan rasa syukur kepadanya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan**”. Shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu „alaihi wa sallam, yang telah mengajarkan Islam serta membawa ummat kepada zaman yang terangbenderang, yang syafa’atnya diharapkan di yaumil akhir kelak

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan bersedia menerima saran dan masukan dari semua pihak.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, ibu yang selalu support saya serta banyak berkontribusi demi terselesainya proposal ini sekaligus pendidikan S1 saya.
Kepada ayahanda bapak Irwansyah Lubis dan Ibunda Tercinta Ibu Asni.
2. Bapak Prof Syahrin Harahap, MA Selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk

mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Ibu Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nasution. Selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah.
5. Bapak Hendra Harmain. SE.M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah.
6. Ibu Nurlaila, S.E,M.A,CMA Selaku pembimbing I yang juga telah meluangkan waktu memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Nursantri Yanti, M.E.I Selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Segenap Staff akademik dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selama ini telah membantu proses kegiatan belajar di kampus tercinta.
9. Untuk Ibu kedua saya Ibu Suryati yang selalu mendoakan saya.
10. Untuk Abang saya yang selalu mensupport dan membantu menyelesaikan pendidikan saya Abangda Zulfikar Lubis, SH.
11. Untuk Adik-Adik saya Zulfian S. Lubis dan Zulita Eflida Lubis yang selama ini selalu ada untuk saya.
12. Partner Skripsi saya tercinta Rimsa Budi Arjuna, S.ST yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk saya
13. Sahabat yang sangat saya sayangi yang membantu saya banyak hal dalam perkuliahan yaitu Febrina Saraswati.
14. Sahabat seperjuangan saya Sekar Ayu Sridanti, Afifah Haidar, Fani Zahira dan Niken Kesuma Adrian yang selama ini sudah membantu saya menyelesaikan proposal ini sekaligus selalu mensupport saya dalam belajar.
15. Partner Skripsweet dan Sahabat saya Try Dhiyya Fajrina dan Radha Mazly Nasution yang sama-sama berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi mengejar gelar sarjana (S1).

16. Teman se-Organisasi saya sebagai Badan Pengurus Harian GenBI Sumut M. Ajie Naufal Ma'ruf, Radha Mazly Nasution dan Maulana Siregar, SE yang selalu memberikan motivasi selama diperkuliahkan dan organisasi.
17. Kakak-Kakakku Tercinta, Kak Meme, Kak Liza, Kak Uwik yang menjadi panutan untuk saya.
18. Teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2017 kelas B yang menjadi keluarga kecil saya di kampus terinta UIN Sumatera Utara dan selalu ada dalam suka maupun duka serta selalu mengajarkan saya banyak hal. Serta semua pihak yang sudah membantu saya menyelesaikan skripsi dan memotivasi saya untuk terus semangat. semoga skripsi ini memberi manfaat bagi para pembaca terkhusus bagi penulis.
19. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuliana Sahfika Lubis

NIM : 0502172355

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 Agustus 1998

Pekerjaan : Mahasiswi

Alaamt : Jalan Kapten Rahmad Buddin Gang Jagung Komplek BGR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhandha Ghara Rekso (Persero) Divre I Medan."** Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Zuliana Sahfika Lubis

NIM 05.02.17.23.55

ABSTRAK

Nama Zuliana Sahfika Lubis, NIM. 05.02.17.23.55, dengan Judul “**Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan**” dibawah bimbingan Ibu Nurlaila, SE, MA sebagai Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Nursantri Yanti, M.EI sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan system perhitungan dan pemotongan PPh 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah cara dan system perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ini belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, karena dalam perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan ternyata perusahaan tidak membulatkan penghasilan kena pajak kedalam ribuan penuh. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh. Dalam hal ini perusahaan tidak melakukannya yang akan mengakibatkan perbedaan di PPh Terutang Pasal 21.

Selain itu perusahaan juga tidak memberikan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP, karena menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ayat 5(a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Gaji Karyawan

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	8
A. Kajian Teoritis	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
a. Fungsi Budgeter	9
b. Fungsi Regulered	9
c. Fungsi Distribusi	10
d. Fungsi Demokrasi	10
3. Jenis-Jenis Pajak	11
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
5. Macam-Macam PPh.....	15
a. PPh Pasal 21	15
b. PPh Pasal 22.....	16
c. PPh Pasal 23.....	16
d. PPh Pasal 24.....	17
e. PPh Pasal 25	18

6. Pajak Penghasilan Pasal 21	18
a. Pengertian PPh Pasal 21	18
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	22
c. Subjek Pajak Penghasilan	23
d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	25
e. Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	26
f. Objek Yang Dipotong PPh Pasal 21	27
g. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	28
h. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21	29
i. Tarif PPh Pasal 21	31
j. Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 21	32
7. KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)	34
8. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	36
a. Definisi Akuntansi	36
b. Siklus Akuntansi	38
c. Peranan Akuntansi Pajak	38
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian	47
1. Pendekatan Penelitian	47
2. Sumber Data	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
1. Tempat Penelitian	47
2. Waktu Penelitian	47
C. Jenis Data	48
D. Definisi Operasional	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Analisis Data	50

1. Deskripsi Objek	50
2. Deskripsi Data.....	50
B. PEMBAHASAN.....	58
1. Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.....	58
a. Perhitungan PPh 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan	58
b. Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan	59
c. Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan	61
BAB V KESIMPULAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perhitungan PPh 21 Sesuai Perusahaan	5
Tabel 2.1 : Tarif WPOP dalm UU No 17 Tahun 2000	23
Tabel 2.2 : Tarif WPOP dalam UU No 36 Tahun 2008	23
Tabel 2.3 : Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	31
Tabel 2.4 : Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	48
Tabel 4.1 : Perhitungan PPh 21 Tahun 2020 (Sesuai Perhitungan Perusahaan)	51
Tabel 4.2 : Perhitungan PPh 21 Tahun 2020 (Sesuai Undang-Undang Pajak)	55
Tabel 4.3 : Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual	47
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh pasal 21. Adapun kegiatan usaha, profesi, atau pekerjaan yang dilakukan subjek pajak selama menerima penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Sumber daya alam semakin lama semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.¹

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Untuk itu dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap Undang – Undang Perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan. Terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang – Undang No.17 Tahun 2000 menjadi Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan Undang – Undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian, dan perubahan. Self assessment system yang telah diterapkan pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaannya di lapangan.²

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

¹ Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 2

² Meyliza Dalughu, “Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15 No. 03, 2015, hal.107

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.³

Pemotong Pajak atau Subjek Pajak atas PPh Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja, yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendaharawan atau Pemegang Kas Pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tunjangan hari tua atau Jaminan hari tua.
4. Penyelenggara kegiatan termasuk Badan Pemerintah, Organisasi yang berindak Nasional dan Internasional atau Penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
5. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan berindak untuk atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.⁴

³ Yahya Nusa, "Analisis perhitungan, pemotongan dan pemahaman tentang pph pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic Operation Support", Jurnal Ulet Vol. 1, No. 02, Oktober 2017, hal. 7

⁴ Indra Efendi Rangkuti dkk, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, (Medan: Madenatera, 2019), hal. 158

Saat membayar pajak yang terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SSP), dan saat melaporkan pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu penyetoran pajak bulanan terutang adalah setiap 10 hari setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 SSP, dan batas waktu pelaporan pajak bulanan terutang adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Titik. Batas akhir penyetoran utang pajak tahunan menggunakan SSP adalah tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya, dan batas waktu penggunaan SPT Tahunan untuk melaporkan hutang pajak tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya.

Dalam menentukan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat (seperti perpajakan), salah satu hukum Islam didasarkan pada kepentingan umum. Salah satu aturan ushul fiqh menetapkan bahwa kepentingan umum didahulukan dari kepentingan khusus. Menurut tokoh mazhab Maliki, inilah dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pemungutan pajak.

Pada dasarnya, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, perpajakan (dharibah) sebagai salah satu sumber pendapatan negara tidak masuk akal, karena Islam mewajibkan mereka yang telah menunaikan zakat yang bersangkutan untuk ikut mengeluarkan zakat. Namun, mungkin ada situasi di mana zakat tidak lagi cukup untuk pendanaan negara, dan kemudian peraturan yang sangat ketat diperbolehkan untuk memungut pajak pada saat itu, seperti yang ditentukan oleh ahli halli wal aqdi. Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif).

Akuntansi dari perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Pada penelitian ini saya sangat tertarik untuk meneliti masalah pada perusahaan ini dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya. PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN. Bergerak di bidang jasa pergudangan dan transportasi, PT BGR (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1976 pada tanggal 11 April 1977. Saat ini , PT BGR (Persero) bertransformasi menjadi perusahaan penyedia jasa logistik yang terintegrasi, dan mengelola beragam komoditi seperti : elektronika, timah, telekomunikasi, farmasi, consumer goods, barang proyek, semen, produk pertanian, pupuk, perkebunan, alutsista, dan lain-lain. Untuk menuju misi tersebut, perusahaan didukung oleh karyawan dengan membayar kompensasi yang sesuai.

Data Perhitungan gaji beberapa karyawan pada PT.Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan pada tahun 2020,2019,2018 dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan data dilampiran bahwa terdapat karyawan yang masih belum ber- NPWP. Namun PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan memotong PPh Pasal 21 tetap dengan tarif Pasal 17 (5%), padahal seharusnya sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU PPh tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi. Terlihat PKP (penghasilan kena pajak) yang tercantum didaftar gaji perusahaan nilainya sampai dengan satuan, padahal seharusnya berdasarkan pasal 17 ayat (4) itu disebutkan 4 untuk keperluan menghitung PPh yang terutang maka nilai penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah dalam bentuk ribuan penuh. Sehingga kalau dia dibulatkan kedalam ribuan penuh, maka nilai PPh terutang itu pasti dalam bentuk puluhan tidak dalam bentuk ratusan. Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tabel 1.1
Perhitungan PPh 21 Tahun 2020 (Sesuai Perhitungan Perusahaan)

No	Nama	Status	NPWP	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Gaji Setahun	PTKP	PKP	Tarif	PPh Pasal 21 Sebulan
1	SYAHRIZAL, SE	K/3	47.536.xx	15,948,674.65	500,000.00	112,559.20	183,937,385.40	72,000,000.00	111,937,385.40	5%	466,405.77
2	NURIANTO, SE	K/3	47.496.xx	8,451,127.51	422,556.37	114,301.50	94,971,235.68	72,000,000.00	22,971,235.68	5%	95,713.48
3	HENDRA NOVA	K/0		5,920,100.98	296,005.04	28,902.15	67,142,325.48	58,500,000.00	8,642,325.48	5%	36,009.68
4	ZAINUDDIN	K/3	47.536.xx	6,108,543.86	305,427.19	68,688.00	68,813,144.04	72,000,000.00	3,186,855.96	5%	-
5	M. PRANATA	K/1		2,842,424.70	142,121.23	14,565.70	32,228,853.24	63,000,000.00	30,771,146.76	5%	-
6	SEPTIAN DWI	K/0		3,989,100.37	199,455.01	17,844.00	45,261,616.32	58,500,000.00	13,238,383.68	5%	-
7	WALUYO	K/2		2,870,067.54	143,503.37	15,455.00	32,533,310.04	67,500,000.00	34,966,689.96	5%	-
8	BONASER, SE	K/3	47.496.xx	7,547,486.98	377,374.34	95,411.85	84,896,409.48	72,000,000.00	12,896,409.48	5%	53,735.04
9	M. YUSUF	K/1	59.031.xx	6,234,998.56	311,749.92	33,890.25	70,672,300.68	63,000,000.00	7,672,300.68	5%	31,967.92
10	M. RIDWAN	K/3		2,783,094.30	139,154.71	13,655.75	31,563,406.08	72,000,000.00	40,436,593.92	5%	-
11	BAMBANG N	K/2	47.496.xx	6,028,915.34	301,445.76	68,020.70	67,913,386.56	67,500,000.00	413,386.56	5%	1,722.44
12	KARIMUDDIN	K/3	67.819.xx	5,762,771.65	288,138.58	50,715.67	65,087,008.80	72,000,000.00	6,912,991.20	5%	-
13	YENNY M	TK	47.496.xx	6,104,453.76	305,222.68	90,113.45	68,509,411.56	54,000,000.00	14,509,411.56	5%	60,455.88
14	ARI K	K/1	89.526.xx	5,356,270.53	267,813.52	35,670.15	60,633,442.32	63,000,000.00	2,366,557.68	5%	-
15	PITRA N	K/0		2,613,209.30	130,660.46	13,455.00	29,629,126.08	58,500,000.00	28,870,873.92	5%	-
16	SATRIA S	K/3	47.496.xx	7,274,774.86	363,738.74	82,765.42	81,939,248.40	72,000,000.00	9,939,248.40	5%	41,413.53
17	FATHOLOSAL	K/0	47.536.xx	5,674,987.45	283,749.37	68,580.55	63,871,890.36	58,500,000.00	5,371,890.36	5%	22,382.87
18	EFRIZAL	K/1	47.536.xx	5,923,964.20	296,198.21	68,770.00	66,707,951.88	63,000,000.00	3,707,951.88	5%	15,449.80
19	NENNY TRIANA	TK	47.536.xx	5,675,633.65	283,781.68	61,815.35	63,960,439.44	54,000,000.00	9,960,439.44	5%	41,501.83
20	SARIANI SH	K/1	47.496.xx	6,243,908.67	312,195.43	85,150.55	70,158,752.28	63,000,000.00	7,158,752.28	5%	29,828.13

Berdasarkan hasil observasi pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang – UndangPerpajakan Nomor 36 tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap yang terhadap wajib pajak yang menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak. Oleh karena itu penulis akan menganalisis masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dapat diperoleh informasi tentang permasalahan dan dapat dijadikan identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP seharusnya dikenakan pajak 20%

- lebih tinggi dari tarif normal, tetapi perusahaan tidak melakukannya.
2. Untuk perhitungan PPh Terutang yaitu Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif, seharusnya nilai Penghasilan Kena Pajak tersebut dilakukan pembulatan pada nilai ribuan, tetapi perusahaan tidak melakukannya.
 3. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang seharusnya sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, tetapi perusahaan tidak melakukannya.

C. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas maka perlu dilakukan penyederhanaan masalah dengan membatasi masalah. Masalah yang dibatasi hanya mengenai perhitungan pemotongan pajak PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dipotong oleh PT. Bhanda Ghara Reksa (PERSERO) Divre I Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT.Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ?
2. Apakah penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan .

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis bak secara teori maupun praktik dalam bidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21.
2. Bagi PT. Bhanda Ghara Reksa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk memperbaiki tata cara pemotongan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangkamenaati

ketentuan dalam pelaksanaan perhitungan dan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi Pihak Lain Sebagai Bahan perbandingan yang dapat memberikan masukan dalam rangka melakukan penelitian dan mengkaji masalah yang sama dengan variabel penelitian yang lebih luas lagi dimasa yang akan datang dan juga menambah wawasan dalam akuntansi perpajakan untuk peneliti selanjutnya di kampus UIN Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuan negara⁵.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, juga pernah mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa didalam pajak terdapat unsur-unsur, yaitu:

- a) Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- b) Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

⁵ TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), hlm. 1

⁶ Indra Mahardika Putra, *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan* (Yogyakarta: Quadrant, 2019), hlm. 226

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁷

Kebijakan Penetapan Pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor.⁸

2. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulered. Selain itu juga terdapat fungsi dsitribusi dan fungsi de mokrasi.

a. Fungsi Budgeter

Fungsi Budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi Regulered

Fungsi Regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

1. Pemberlakuan tarif progresif, apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap pemerataan pendapatan nasional.
2. Pemberlakuan Bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas tax-holiday atau pembebasan pajak untuk

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 1

⁸ Isnaini Harahap & M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economic*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016), hlm 120

beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.

4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagai mana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

c. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Berdasarkan Sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya adalah : Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dll.

- b. Berdasarkan Wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

d. Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang perpajakan. Diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya yakni pasal 23 ayat 2. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.⁹

⁹ Januri, Riva Ubar Harahap dkk, *Akuntansi Perpajakan* (Medan: Madenatera, 2020), hal. 8

3. Jenis – Jenis Pajak

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua: pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (periodik) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Kohir (tindakan Surat Ketetapan Pajak). Termasuk dalam pajak langsung ini contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu suatu pajak yang dipungut sekali ketika apa yang dikendaki undang-undang dipenuhi (tidak menggunakan kohir), contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai.

Menurut sasaran/objeknya pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Subjektif dan pajak Objektif.

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Subjek dalam hal ini adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Setelah ditentukan subjeknya, baru kemudian dilihat apakah mereka mempunyai atau memperoleh penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di mana yang pertama kali ditentukan adalah objek (bumi dan bangunan) baru kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya.

Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya (kewenangan memungut) yang terdiri dari :

- a) Pajak negara atau pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak setempat (sekarang dinamakan

Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Cukai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya beradapada pemerintah daerah, baik tingkat Provinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor) atau Kabupaten/ Kota (contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir) yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah¹⁰.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Stelsel Pajak, cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Stelsel nyata (riil stelsel), Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan dari stelsel ini pajak yang dikenakan realistis, sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak.
- b. Stelsel Fiktif (Stelsel Anggapan), Penentuan besarnya hutang pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang yang dilakukan didepan (pada awal tahun). Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama setahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari sistem ini terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan.

¹⁰ Bastari, Januri, Dalimunthe, Mohd Idris, Sembiring, Hermansyah, Wahyudi Hery dan Dalimunthe, Hasbiana, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Medan: Publishing, 2015)

- c. Stelsel Campuran, Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel fiktif dan stelsel riil. Dalam stelsel ini, besarnya pajak diitung sesuai anggapan seperti pada stelsel anggapan, besarnya penghasilan dalam tahun berjalan dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayarkan pada awal tahun pajak.
- a. Sistem Pemungutan Pajak, Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :
 - 1) Self Assesment System Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak (WP) yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
 - 2) Withholding System, Pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung , memungut dan menyetorkan utang pajak.
 - 3) Kerjasama antara WP dengan Fiskus, Wajib pajak menghitung besarnya utang pajak, fiskus yang memutuskan berapa besarnya utang pajak tersebut.
 - 4) Official Assesment System. Pada sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.¹¹
- b. Asas Pemungutan Pajak, adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 asas pemungutan pajak dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Equility

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara,sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan

¹¹ Pranoto, Ayub Torry Satrio, “Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak”, Jurnal Reformasi Birokrasi, Vol. 5 No. 02, Mei-Agustus 2016, hal. 399

keuntungan yang mereka terima. Dalam asas equity ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

2) Certainty (Asas Kepastian)

Asas ini menekankan bahwa lagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3) Convenience of Payment (Asas Menyenangkan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

4) Low Cost Of Collection (Asas Efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.¹²

Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

a. Asas Domisili

Asas domisili disebut juga dengan asas kependudukan. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh dinegara itu maupun penghasilan yang

¹² Bohari, SH, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 41

diperoleh diluar negeri.

b. Asas Sumber

Asas Sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan atau asas nasionalitas disebut juga dengan Kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah, status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas, ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

5. Macam-Macam Pajak Penghasilan

Macam-macam Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

a. **PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pada PPh Pasal 21 ini menggunakan istilah “pemukutan”. Istilah pemukutan digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan

pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21.

b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dimaksudkan pajak yang dipungut atas transaksi pembelian yang dananya bersumber dari APBN/APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lain.

Adapun sesuai Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dapat ditunjuk sebagai pemungut, yaitu:

- 1) Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomatis dan semen.
- 3) Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium.

c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar:

- 1) 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf g.
 - b) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f.
 - c) Royalti
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf e.
- 2) 2% dari jumlah bruto atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sebagaimana maksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh.

d. PPh Pasal 24

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 Ayat (1), PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama. PPh Pasal 24 merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan diluar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang sudah ada didalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda.

e. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai Masa Pajak Desember.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan:

- 1) Pajak Penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan deviden, bunga, royalty, dan hadiah –serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP).
- 2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.¹³

6. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 Menurut pengertiannya Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam

¹³ Januri, Riva Ubar Harahap dkk, *Akuntansi Perpajakan* (Medan: Madenatera, 2020), hal. 105

negeri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan.

Bila penerima penghasilan tersebut adalah WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenai PPh Pasal 21, sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) akan dikenai PPh Pasal 26. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Literatur-literatur Islam yang membahas mengenai sumber-sumber pendapatan negara Islam sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain yaitu pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak kepala yang bisa diasosiasikan dengan zakat mal dan buku Hukum Zakat, Yusuf Qardhawi banyak menyinggung mengenai zakat pencarian dan zakat profesi beserta pandangan mengenai penghasilan dan segala jenisnya serta zakat saham dan obligasi.¹⁴

Dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik, pegawai secara umum diklasifikasikan menjadi dua; pegawai pemerintah yang mengurus urusan publik serta pegawai non pemerintah. Untuk pegawai pemerintah, mayoritas ilmuwan berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan tingkat kecukupan hidup pegawainya, dalam arti standar penetapan upah tidak boleh hanya berdasar manfaat al-juhd semata. Dalam hal ini, mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa riwayat Nabi dan Sahabat yang menyebutkan bahwa mereka memberikan gaji kepada pegawai publik dan pemerintah, selain berdasar manfaat kerja juga berdasar kecukupan pekerja yang berupa kebutuhan pokok, baik

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Ahli Bahasa oleh Salman Harun, cet ke-7, (Bandung: PT. Littera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hlm 476-478

berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lainnya. Bahkan Nabi SAW menganggap istri sebagai kebutuhan bagi yang belum punya istri, demikian juga pembantu bagi pekerja yang tidak dapat melayani dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتُجِرَ أَجْرًا
فَلْيُعْمَ هُ أَجْرَهُ (رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحُذْرِيِّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ)

“Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah memberitahukan kepada orang yang akan dipekerjakan mengenai upah yang akan dia terima” (HR. Abu Said dan Abu Hurairah).¹⁵

Para ahli hukum Islam dan ahli ekonomi Islam kontemporer menyimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada pekerja dengan beberapa jaminan kemanusiaan seperti kerelaan, keadilan, kemampuan dan kelayakan hidup. Islam melarang pemaksaan dalam kerja, memberi upah secara dzalim (tidak sepadan dengan kerja yang dilakukan), sebagaimana juga melarang menunda-nunda pembayaran upah. Islam menganggap orang yang menggunakan pekerja dengan tanpa upah sebagai memperbudaknya.

Hukum Islam termasuk dalam zakatul mal, atas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah 9(60) :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ - ٦٠

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pengelola zakat bukan

¹⁵ Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tahrir)”, Jurnal Universum, Vol. 9 No. 1, Januari 2015, hlm. 5

semata mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung ke mustahik, tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam lembaga tersebut terdapat amil zakat yang bertugas mensosialisasikan zakat secara tepat dan benar.

Sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk dari jaminan social yang disyariatkan oleh ajaran islam, melalui syi'at zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawanan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan takwa.¹⁶

Perintah dari ulil amri (pemerintah wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan) serta kemaslahatan bersama Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-nisa 4 (59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping menunaikan kewajiban zakat yang dimana zakat adalah sesuatu yang wajib dibayarkan bagi seseorang yang mampu. Begitu juga dengan wajib pajak yang dimana ketentuan pembayaran pajak ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan bersama dan sebagai kelangsungan bernegara. Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin tidak datang dengan lafazh “taatilah”, karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda :

¹⁶ Didin Hafidbhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm.12

“Seorang Muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari No. 7144).

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah 9 (29) :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ¹⁷

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”¹⁷

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Didalam UU No. 17 Tahun 2000 ditetapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp 600.000.000 dalam satu tahun dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.

Sekarang didalam UU No. 36 Tahun 2008 ketentuan tersebut telah diubah sehingga batas peredaran usaha dalam satu tahun untuk dapat

¹⁷ At Taubah (9): 29

menggunakan norma penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi menjadi Rp 4.800.000.000.

Sebelumnya ditetapkan bahwa besarnya tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif WPOP dalam UU No. 17 Tahun 2000

Lapisan Penghasilan	Tarif
s/d Rp 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	35%

Sumber : UU No. 17 tahun 2000 yang disederhanakan

Dalam UU No. 36 Tahun 2008, tarif pajak bagi WPOP tersebut telah diubahmenjadi:

Tabel 2.2

Tarif WPOP dalam UU No. 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan	Tarif
s/d 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008 yang disederhanakan

c. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengandemikian ia disebut sebagai Wajib Pajak.

- 1) **Pegawai**, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

- 2) **Penerima uang pesangon**, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) **Bukan pegawai**, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, pemerintah.
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektromatika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen Iklan.
 - h) Pengawas atau Pengelola Proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan atau yang menjadi perantara.

- j) Petugas penjajah barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi.
 - l) Distributor, perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan jenis lainnya.
- 4) Peserta kegiatan,** yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dari segala bidang, antara lain: perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 - e) Peserta kegiatan lainnya.¹⁸

d. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun penghasilan-penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong pajak penghasilan (PPh 21), antara lain:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah

¹⁸ Indra Efendi Rangkuti dkk, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, (Medan: Madenatera, 2019), hal. 160

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang di terima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 10) Penerimaan dalam bentuk natura/ kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus¹⁹.

e. Non Objek Pajak Penghasilan 21

Yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Bukan PPh 21) adalah:

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Jakarta: Andi Offset, 2018), hal: 193

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah maupun Wajib Pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 5) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjangan hari tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, yang jumlah brutonya tidak melebihi Rp. 25.000.000
- 6) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.²⁰

f. Objek Yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final adalah:

- 1) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Uang Pesangon
- 3) Hadiah dan Penghargaan Lomba
- 4) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
- 5) Penghasilan bruto honorarium yg diterima oleh pejabat negara,

²⁰ Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 151

pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara.²¹

Adapun ayat yg menjelaskan mengenai pemotongan dari penghasilan yaitu:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan/ketaatan yang mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Swt bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam shalat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan adalah yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah Swt, dan lainlain yang disebutkan ayat tersebut. Islam mengajarkan untuk tertib dalam amaliah, yang dimulai dengan iman, diikuti dengan rasa cinta kepada sesama manusia, dan diiringi lagi dengan iman kepada Allah Swt dengan shalat yang khusyu', lalu berzakatlah, teguhlah memegang janji, bersabarlah memikul tugas hidup. Kalau semua itu sudah terisi, barulah pengakuan iman dapat diterima oleh Allah Swt, dan barulah terhitung dan termasuk dalam daftar Allah Swt sebagai seorang yang benar (shadaqu).

g. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK Nomor 199/PMK. 03/ 2007, antara lain:

- 1) Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21.
- 2) Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang pada

²¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 157

waktu dilakukan perhitungan kembali.

- 3) Pemotong berhak untuk membetulkan sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Pemotong pajak wajib mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 5) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 6) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya pemotongan pajak.

h. Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotong Pajak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 2) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 3) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- 4) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan

takwim berikutnya.

- 5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangondan penerima dana pensiun.
- 6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- 7) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.
- 8) Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Tempat Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 32 tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- 9) Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT

Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.²²

i. Tarif Pajak Pasal 21

Dalam menghitung PPh 21 terutang, secara umum, tarif pajak yang berlaku tentang Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008.

Tabel 2.3
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – 50.000.000	5%
Diatas 50.000.000 – 250.000.000	15%
Diatas 250.000.000 – 500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

* TK/0 = Rp.54.000.000

* K/0 = Rp.58.500.000

* K/1 = Rp.63.000.000

* K/2 = Rp.67.500.000

* K/3 = Rp.72.000.000

Tarif 15% digunakan untuk menghitung PPH 21 bagi WP OP dalam negeri yang merupakan kelompok tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris), Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II D kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu kebawah.

PPh 21 terutang = 15% x Perkiraan Penghasilan Neto

²² Christiana Lydia, “Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT X”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 9 No. 1a, November 2017, hlm. 268

$\text{PPh 21 terutang} = 15 \times 50\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Sedangkan tarif 5% digunakan untuk menghitung PPh 21 WP OP dalam negeri yang merupakan pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, satuan atau borongan. Batasan penghasilan yang tidak kena pajak adalah Rp 110.000/hari, namun dalam sebulan tidak boleh melebihi PTKP sebulannya. Apabila ternyata dalam sebulan WP OP tersebut secara kumulatif menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP-nya, maka perhitungan PPh 21-nya disesuaikan dengan tarif pasal 17 UU PPh.²³

j. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Adapun tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yaitu:

1) Bagi Pegawai Tetap

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya Jabatan
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya jabatan} - \text{Iuran pensiun dan iuran} \\ &\quad \text{THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh.}\end{aligned}$$

Bagi penerima pensiun berkala:

Besarnya penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkalsebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netoadalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. $\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$
 $\text{PPh} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU}$

²³ Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 124

PPh.²⁴

2) Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan, atau pegawai tidak tetap lainnya yang jumlah kumulatif penghasilan yang diterima sebulan melebihi PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri/TKO (dalam hal ini sesuai dengan UU PPh adalah Rp.1.320.000).

Rumus : Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – PTKP Bukan Pegawai, meliputi :

- a) Distributor MLM atau Direct selling.
- b) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai.
- c) Penjahat barang dagangan yang tidak berstatus pegawai.
- d) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh pasal 21 secara berkesinambungan dalam satu tahun kalender. Rumus: Penghasilan kena pajak = Penghasilan bruto – PTKP yang dihitung bulanan.
- e) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan.
- f) Jumlah Penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 21, sesuai dengan PPh Pasal 21 ayat (4) UU PPh yang berlaku bagi: Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan, upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima 36 dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri atau

Catatan :

- a) Batasan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan sesuai pasal 21 ayat 4 adalah 150.000 sehari.
- b) Jika jumlah kumulatif dalam sebulan sudah melebihi Rp.1.320.000 maka pengurangannya adalah PTKP sebenarnya.
- c) Jumlah penghasilan Bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan

²⁴ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

lainnya. Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 (Tahun 2017).²⁵

Gaji Pokok		10.000.000
Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja 0.24%		24.000
Jaminan Kematian 0.30%		<u>30.000</u>
Penghasilan Bruto (Kotor)		12.054.000
Pengurangan		
Biaya Jabatan: $5\% \times 12.054.000 = 602.700$	602.700	
Iuran JHT (Jamina Hari Tua), 2% dari gaji pokok	200.000	
JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	<u>100.000</u>	
		<u>902.700</u>
Penghasilan Netto (Bersih) Bulanan		11.151.300
Penghasilan Netto setahun $12 \times 11.151.300$		133.815.600
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		79.815.000
PPh Terutang (lihat tarif PPh Pasal 21)		
$5\% \times 50.000.000$	22.500.000	
$15\% \times 29.815.600$	4.472.340	
PPh Pasal 21 setahun = 6.972.340		
PPh Pasal 21 sebulan = $6.972.340 : 12$		581.028

7. KUP (Ketentuan Umum Perpajakan)

Penjelasan pasal 4 UU PPh menegaskan bahwa undang–undang perpajakan indonesia menganut prinsip pemajakan dalam pengertian yang luas. Maksud penjelasan tersebut adalah bahwa pajak dikenakan terhadap setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Tambahan tersebut tidak peduli asalnya, dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Perlu dipahami bahwa

²⁵ Bohari, “*Pengantar Hukum Pajak*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal . 51

penghasilan dalam undang – undang ini difokuskan pada adanya tambahan ekonomis, tetapi tidak diperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu. Undang – undang memandang penghasilan sebagai sesuatu yang luas. Konsekuensinya adalah bahwa semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Terkait dengan pengenaan pajak ada dua hal yang perlu diperhatikan:

- a) Apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri.
- b) Apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Undang–undang syarat universal serta tata metode perpajakan dilandasi filsafah pancasila serta undang- undang dasar 1945 yang didalamnya tertuang syarat yang menjunjung besar hak masyarakat negeri serta menempatkan kewajiban perpajakan selaku kewajiban negara.

Dasar hukum syarat universal serta tata metode perpajakan merupakan undang- undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana sudah diganti terakhir dengan undang- undang Nomor. 28 tahun 2007. UU Nomor. 28 tahun 2008 pada dasarnya mengendalikan hak serta kewajiban harus pajak, wewenang serta kewajiban aparat pemungut pajak, dan sanksi perpajakan. Sebagian sebutan yang umum digunakan dalam perpajakan sebagaimana yang mengacu pada UU. Nomor 28 tahun 2007.

Pada biasanya tahun pajak sama dengan tahun takwim ataupun tahun kalender, hendak namun harus pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan ketentuan tidak berubah- ubah sepanjang 12 bulan, serta melapor kepada kantor pelayanan pajak pratama setempat. Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak selaku fasilitas dalam administrasi perpajakan yang digunakan selaku ciri pengenalan diri ataupun bukti diri wajib pajak dalam melakukan hak

serta kewajiban perpajakan. Seluruh wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif serta objektif cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan perpajakan bersumber pada self assesment system. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan pengadilan berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin juga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan suaminya

8. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

a) Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para kepentingan²⁶. Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (tax accounting) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidakcocokan aturan antara akuntansi pajak

²⁶ Dwi Martani, dkk, "*Akuntansi keuangan Menengah*.. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016), hal. 52

dengan pedoman laporan keuangan. Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat. secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Akuntansi perpajakan, secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan itu karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya.

Pasal 4 ayat (4) UU KUP 2007 meminta kepada wajib pajak badan yang semuanya wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan (tidak wajib), tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan

perhitungan laba rugi serta keterangan- keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan tidakadanya penggarisan laporan keuangan itu, dalam praktek terdapat pendapat yang mendua antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial.

Dengan demikian, kita perlu menyadari SPT itu khusus untuk tujuan perpajakan, sementara orang berpendapat secara implisit laporan keuangan itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan (laporan keuangan fiskal). Sesuai dengan proses penyusunan, laporan itu merupakan laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan kebiasaan dan praktek akuntansi komersial, kemudian disusun kembali sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b) Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi menurut Wilk dan Kwok dilakukan mulai dari:

- 1) Menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal.
- 2) Mencatat akun-akun termasuk debit dan kredit dalam jurnal.
- 3) Meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah.
- 4) Mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date, menjual dan posting penyesuaian.
- 5) Menyesuaikan akun buku besar dan jumlah.
- 6) Menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan
- 7) Menjurnal dan posting entri untuk menutup akun sementara.
- 8) Tes keakuratan dari prosedur penutupan.
- 9) Jurnal pembalik dalam periode berikutnya (pilihan).²⁷

c) Peranan Akuntansi Pajak

- 1) Peranan akuntansi pajak berikut beberapa peranan akuntansi pajak diperusahaan yang ternyata cukup signifikan: Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan (strategi yang positif, bukan

²⁷ Sukrisno Agoes dan Trisnawati Estralita, “*Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hal. 2

mencurangi).

- 2) Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang.
- 3) Meimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas perpajakan serta menyanyikan didalam laporan keuangan fiscal maupun laporan keuangan komersial.
- 4) Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baik serta disajikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi.²⁸

²⁸ *Ibid* hal. 8

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1	Nurzanah, 2018	Pengaruh Gaji Karyawan Tetap Terhadap PPh Pasal 21	Penelitian yang dilakukan oleh Nurzanah membahas mengenai pengaruh gaji karyawan terhadap PPh 21 dan metode yang digunakan adalah kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis perhitungan pemotongan PPh 21 terhadap gaji	Nurzanah dan penulis sama-sama meneliti gaji karyawan dan PPh 21	Hasil perhitungan kolerasi sebesar 0,961. Menurut sugiyono yaitu koeifisien 0,80-1,00 mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaji karyawan tetap dengan pajak penghasilan pasal 21 memiliki hubungan yang sangat kuat.

			karyawan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.		
2	Hasibuan, 2018	Analisis penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU NO. 36 Tahun 2008	Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan menggunakan tiga Metode yaitu: Metode Gross Up, Metode Net, Metode Gross.	Menganalisis perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan.	Alasan perusahaan tunjangan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan, karena tunjangan adalah bentuk natura.
3	Kurniawati, 2017	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan.	Pada penelitian yang dilakukan oleh kurniawati, jenis dan sumber data hanya menggunakan data primer sedangkan	Menganalisis perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan dan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif.	PT. Mapan Abadi Medan terjadi perselisihan data perhitungan tidak sesuai PTKP pada pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan atau tidak menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai

			yang dilakukan oleh penulis menggunakan data primer dan sekunder		dengan peraturan Menteri Keuangan RI No.101/PMK.010/2016.
4	Lisa Novriyanti Siregar, 2018	Analisis Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada Perumnas Regional I.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Lisa Novriyanti adalah perhitungan pemotongan PPh 21 atas gaji karyawan dilakukan pada perumnas Regional I Medan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti PPh 21 atas gaji	Menganalisis perhitungan dan pemotongan Pph 21 atas gaji karyawan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.	Dari analisis pada Perumnas Regional I terjadi perselisihan data perhitungan dikarenakan perusahaan memotong tarif yang sama baik pegawai yang mempunyai NPWP maupun tidak memiliki sebesar 5%. PPh 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.

			karyawan pada PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Divre I Medan.		
5	Fazri Nurrahman Ramli, 2017	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap di PT. Perkebunan Nusantara III.	Menganalisis perhitungan pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan.	Menganalisis pajak penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan.	Prosedur perhitungan PPh 21 terhadap penghasilan pegawai tidak sesuai antara jumlah PPh 21 menurut PT. Perkebunan Nusantara III dengan UU No. 36 Tahun 2008.
6	Nyimas Nisrina Nabilah (Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No.1	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan perencanaan Pajak PPh dan menggunakan empat metode Gross Meth-	Menggunakan metode analisis yang sama pada pajak penghasilan yaitu analisis deskriptif.	Dari hasil perhitungan terlihat jumlah penghasilan karyawan selama satu tahun adalah Rp 77.160.000 dan jumlah pajak

		PT Z)	od, Net Method, Non Gross Up Method, Gross Up Method		penghasilannya adalah sebesar Rp 3.174.639. kebijakan perus- ahaan menanggung pajak penghasilan karyawannya membuat jumlah penghasilan bersih yang diterima karyawannya sebesar Rp 102.497.590. hal ini dapat merugikan pe- rusahaan karena laba fiskal pe- rusahaan menajdi lebih besar.
7	Evi Margorett y Silalahi, Lucky Nugroho, Lawe Anasta (Jurna	Analisis Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporn Pajak Penghasilan	Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang hanya Menggunaka	Menggunakn metode analisis yang sama pada pajak penghasilan yaitu analisis deskriptif.	Untuk mekanisme perhitungan pajak penghasilam n pasal 21 pada PT. Bina

	<p>Tekun)</p> <p>Vol. 8 No.</p> <p>1</p>	<p>Pasal 21 Pada</p> <p>PT. Bina</p> <p>Swadya</p> <p>Konsultan</p> <p>Tahun 2016</p>	<p>n data</p> <p>sekunder</p> <p>sedangkan</p> <p>penelitian</p> <p>yang</p> <p>dilakukan</p> <p>oleh penulis</p> <p>menggunaka</p> <p>n data prime</p> <p>r dan data</p> <p>sekunder.</p>		<p>Swadya</p> <p>Konsultan</p> <p>belum</p> <p>sesuai</p> <p>dengan</p> <p>Undang-Undang</p> <p>Nomor 36 Tahun</p> <p>2008 karena</p> <p>didapati</p> <p>adanya selisih.</p> <p>Hal tersebut</p> <p>disebabkan</p> <p>karena perus-</p> <p>ahaan tidak</p> <p>memasukkan</p> <p>tunjangan</p> <p>kehadiran</p> <p>sesuai dengan</p> <p>peraturan</p> <p>Undang-</p> <p>undang Nomor</p> <p>36</p> <p>Tahun 2008.</p>
--	---	---	--	--	--

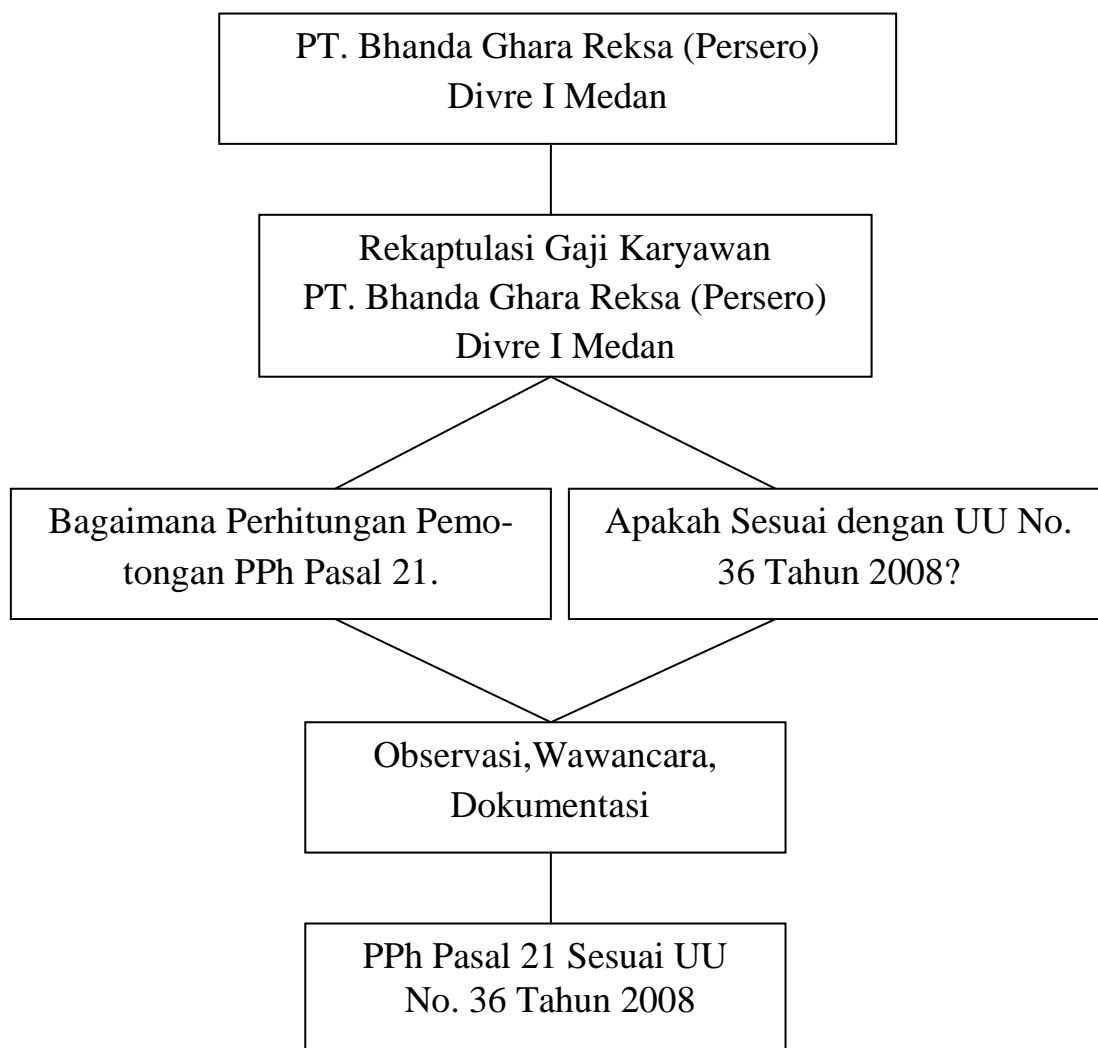
C. Kerangka Teoritis

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadidalam negri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan. Demikian juga dengan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, berkewajiban melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan, PPh 21 yang telah dipotong selanjutnya disetorkan ke rekening negara dan dilaporkan dalam SPT PPh 21 setiap masa pajak. Keterlambatan atas kelalaian PT. Bhanda Ghara Reksa Medan dalam melaksanakan tagihan perpajakan tersebut mengakibatkan dikenakannya sanksi administrasi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kesesuaian pelaksanaan kewajiban tersebut yang dilakuka PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan PPh Pasal 21.²⁹

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- a. Data primer berupa wawancara kepada staf pegawai PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan
- b. Data sekunder berupa laporan gaji, dan struktur organisasi perusahaan yang diperoleh penulis dari sumber yang ada dengan mengunjungi ke objek penelitian yaitu PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan yang beralamat di Jl. Titi Pahlawan Medan Marelan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan November 2020

²⁹ Nur Ahmadi, Metode Penelitian Ekonomi (Medan: FEBI UINSU Press, 2016)hal.4

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Judul Penelitian					
		2020		2021			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Tahap Persiapan						
2	Pengajuan Judul						
3	Pengambilan data dan Penelitian						
4	Penyusunan Proposal						
5	Bimbingan Proposal						
6	Seminar Proposal						

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk daftar rekapitulasi gaji.
- Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya suatu penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Komponen yang diteliti dalam perhitungan ini antara lain adalah tarif pajak yang dikenakan, pembulatan nilai penghasilan kena pajak.

2. Pemotongan Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan pimpinan atau karyawan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, sedangkan dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini dan mengenai data gaji karyawan.

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2018, 2019 dan 2020.
2. Menghitung jumlah gaji karyawan dari keseluruhan komponen penghasilan.
3. Melakukan penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada penghitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa pegudangan yang berdiri pada tanggal 11 April 1977 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976 di Semarang, Jawa Tengah Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BGR turut mengemban misi menunjang kebijaksanaan pemerintah dan memabnatu pelaku bisnis dan industri, khususnya di bidang penyelenggara jasa penyewaan dan pengelolaan ruangan serta proses pengiriman barang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat dan undang-undang perseroan terbatas.

Dalam perjalanannya BGR melakukan transformasi menjadi jasa logistic, dengan visi menjadi perusahaan jasa logistic yang memberikan solusi, handal dan terkemuka dengan motto "*Total Logistics Solution*", BGR siap menjadi mitra terpercaya perusahaan anda dalam menangani berbagai kegiatan logistic antara lain:

- a) Supply Chain Management
- b) Supply Chain Design Solution
- c) Distribution and Warehousing
- d) Transportation
- e) Logistic Information Technology

2. Deskripsi Data

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data perhitungan gaji karyawan tetap Tahun 2020 di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, berikut data terlampir. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan

penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tariff pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar ditahun berikutnya.

Tabel 4.1
Perhitungan PPh 21 Tahun 2020
(Sesuai Perhitungan Perusahaan)

No	NAMA	STATUS	NPWP	GAJI BRUTO	BIAYA JABATAN	IURAN PENSUN	GAJI SETAHUN	PTKP	PKP	5%	PPh PASAL 21 SEBULAN
1	SYAHRIZAL, SE	K/3	47.536.xx	Rp 15,948,674.65	Rp 500,000.00	Rp 112,559.20	Rp 183,937,385.40	Rp 72,000,000.00	Rp 111,937,385.40	5%	Rp 466,405.77
2	NURIANTO, SE	K/3	47.496.xx	Rp 8,451,127.51	Rp 422,556.37	Rp 114,301.50	Rp 94,971,235.68	Rp 72,000,000.00	Rp 22,971,235.68	5%	Rp 95,713.48
3	HENDRA NOVA	K/0		Rp 5,920,100.98	Rp 296,005.04	Rp 28,902.15	Rp 67,142,325.48	Rp 58,500,000.00	Rp 8,642,325.48	5%	Rp 36,009.68
4	ZAINUDDIN	K/3	47.536.xx	Rp 6,108,543.86	Rp 305,427.19	Rp 68,688.00	Rp 68,813,144.04	Rp 72,000,000.00	-Rp 3,186,855.96	5%	-
5	M. PRANATA	K/1		Rp 2,842,424.70	Rp 142,121.23	Rp 14,565.70	Rp 32,228,853.24	Rp 63,000,000.00	-Rp 30,771,146.76	5%	-
6	SEPTIAN DWI	K/0		Rp 4,989,100.37	Rp 239,455.01	Rp 75,844.00	Rp 58,959,076.44	Rp 58,500,000.00	Rp 459,076.44	5%	Rp 1,912.81
7	WALUYO	K/2		Rp 2,870,067.54	Rp 143,503.37	Rp 15,455.00	Rp 32,533,310.04	Rp 67,500,000.00	-Rp 34,966,689.96	5%	-
8	BONASER, SE	K/3	47.496.xx	Rp 7,547,486.98	Rp 377,374.34	Rp 95,411.85	Rp 84,896,409.48	Rp 72,000,000.00	Rp 12,896,409.48	5%	Rp 53,735.04
9	M. YUSUF	K/1	59.031.xx	Rp 6,234,998.56	Rp 311,749.92	Rp 33,890.25	Rp 70,672,300.68	Rp 63,000,000.00	Rp 7,672,300.68	5%	Rp 31,967.92
10	M. RIDWAN	K/3		Rp 2,783,094.30	Rp 139,154.71	Rp 13,655.75	Rp 31,563,406.08	Rp 72,000,000.00	-Rp 40,436,593.92	5%	-
11	BAMBAING N	K/2	47.496.xx	Rp 6,028,915.34	Rp 301,445.76	Rp 68,020.70	Rp 67,913,386.56	Rp 67,500,000.00	Rp 413,386.56	5%	Rp 1,722.44
12	KARIMUDDIN	K/3	67.819.xx	Rp 5,762,771.65	Rp 288,138.58	Rp 50,715.67	Rp 65,087,008.80	Rp 72,000,000.00	-Rp 6,912,991.20	5%	-
13	YENNY M	TK		Rp 6,104,453.76	Rp 305,222.68	Rp 90,113.45	Rp 68,509,411.56	Rp 54,000,000.00	Rp 14,509,411.56	5%	Rp 60,455.88
14	ARI K	K/1	89.526.xx	Rp 5,356,270.53	Rp 267,813.52	Rp 35,670.15	Rp 60,633,442.32	Rp 63,000,000.00	-Rp 2,366,557.68	5%	-
15	PITRA N	K/0		Rp 2,613,209.30	Rp 130,660.46	Rp 13,455.00	Rp 29,629,126.08	Rp 58,500,000.00	-Rp 28,870,873.92	5%	-
16	SATRIA S	K/3	47.496.xx	Rp 7,274,774.86	Rp 363,738.74	Rp 82,765.42	Rp 81,939,248.40	Rp 72,000,000.00	Rp 9,939,248.40	5%	Rp 41,413.53
17	FATHOLSA L	K/0	47.536.xx	Rp 5,674,987.45	Rp 283,749.37	Rp 68,580.55	Rp 63,871,890.36	Rp 58,500,000.00	Rp 5,371,890.36	5%	Rp 22,382.87
18	EFRIZAL	K/1	47.536.xx	Rp 5,923,964.20	Rp 296,198.21	Rp 68,770.00	Rp 66,707,951.88	Rp 63,000,000.00	Rp 3,707,951.88	5%	Rp 15,449.80
19	NENNY TRIANA	TK	47.536.xx	Rp 5,675,633.65	Rp 283,781.68	Rp 61,815.35	Rp 63,960,439.44	Rp 54,000,000.00	Rp 9,960,439.44	5%	Rp 41,501.83
20	SARIANI SH	K/1	47.496.xx	Rp 6,243,908.67	Rp 312,195.43	Rp 85,150.55	Rp 70,158,752.28	Rp 63,000,000.00	Rp 7,158,752.28	5%	Rp 29,828.13

Sumber data: PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Divre I Medan

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan menurut PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang dengan menggunakan tariff PTKP terbaru 2016.

Contoh 1 perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang pajak. Pegawai Hendra Nova di Bhandha Ghara Reksha (Persero) Divre I Medan sebagai karyawan tetap dengan status K/0 memperoleh gaji setahun

Rp 67.142.324,90-.,

Besarnya pajak yang harus dibayar adalah :

Gaji Sebulan Rp 5.920.100,98

Biaya Jabatan

(Rp 5.920.100,98 x 5%) = Rp 296.005,09

Iuran Pensiun Rp 28.902,15 ±

Jumlah (Rp 324.907,19)

Penghasilan Netto Setahun Rp 5.595.193,74 x 12 = Rp 67.142.324,90

PTKP K/0 (Rp 58.500.000,00)

PKP Setahun Rp 8.642.324,90

PPh 21 Terutang

(Rp 8.642.324,90 x 5%) = Rp 432.116,24

PPh 21 Sebulan Rp 432.116,24/12 = Rp 36.009,68

Sesuai Undang-Undang Pajak dengan PTKP baru Tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun Rp 67.142.324,90

PTKP K/0 Rp 58.500.000,00

PKP Setahun Rp 8.642.324,90,-

PPh 21 Terutang

(8.642.324,90 x 5% x 120%) = Rp 518.539,49,-

PPh 21 Sebulan Rp 518.539,49/12 = Rp 43.211,62

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang yaitu Rp 432.116,24 dan Rp 518.539,49 selisihnya sebesar 86.423,25 merupakan kurang bayar bagi PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan tariff PPh terbaru 2016 yaitu dengan tidak mengenakan denda 20% lebih tinggi normal bagi pegawai yang tidak mempunyai NPWP dan perusahaan juga tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak ribuan penuh.

Contoh 2

Gaji Sebulan Rp 15.948.647,65

Biaya Jabatan Rp 500.000,00

Iuran Pensiun Rp 112.559,20

Jumlah	(Rp 612.559,20)
Gaji Netto Sebulan	Rp 15.336.088,40
Penghasilan Netto Setahun $Rp\ 15.336.088,40 \times 12 =$	Rp 184.033.060,80
PTKP	
Wajib Pajak	Rp 54.000.000,00
Istri	Rp 4.500.000,00
Anak K/3	<u>Rp 13.500.000,00+</u>

Jumlah PTKP	(Rp 72.000.000,00)
PKP	Rp 112.033.060,80
PPH Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 62.033.060,80 =	<u>Rp 9.304.959,12+</u>
	Rp 11.804.959,12

PPH Pasal 21 Sebulan $Rp\ 11.804.959,12/12 = Rp\ 984.004,31$

Perhitungan Menurut Undang-Undang

Penghasilan Netto Setahun	Rp 184.033.678,80
PTKP K/3	Rp 72.000.000,00
PKP Setahun	Rp 112.033.060,80
Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh	Rp 112.034.000,00
PPH Pasal 21 Terutang	
5% x 50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x 62.034.000,00 =	<u>Rp 9.305.100,00+</u>
	Rp 11.805.100,00

PPH Pasal 21 Sebulan $Rp\ 11.805.100,00/12 = 983.758,33$

Dari Perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT. Bhanda Ghara Reksa dan menurut Undang-Undang yaitu Rp 11.804.959,12 dan Rp 11.805.100,00 selisihnya sebesar Rp 140,88 ini terjadi disebabkan karena PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) kedalam ribuan rupiah penuh untuk pegawai yang bernama Syahrizal dan untuk NPWP

pegawai tersebut sudah memilikinya dan sudah sesuai dengan perhitungan tarif menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 21 Tahun 2016.

Contoh 3

Gaji Sebulan		Rp 2.783.094,30
Biaya Jabatan	Rp 139.154,71	
Iuran Pensiun	Rp <u>13.655,75+</u>	
Jumlah		<u>(Rp 152.810,46)</u>
Gaji Netto Sebulan		Rp 2.630.283,54
Penghasilan Netto Setahun	$Rp 2.630.283,54 \times 12 =$	Rp 31.563.402,50

PTKP

Wajib Pajak	Rp 54.000.000,00	
Istri	Rp 4.500.000,00	
Anak K/3	Rp 13.500.000,00	
Jumlah PTKP		<u>(Rp 72.000.000,00)</u>
PKP		(Rp 40.436.597,50)
Perhitungan Menurut Undang-Undang		
Penghasilan Netto Setahun		Rp 31.573.402,50
PTKP K/3		(Rp 72.000.000,00)
PKP		(Rp 40.436.597,50)
Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh		Rp 40.436.600,00

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pegawai atas nama M Ridwan Penghasilannya tidak melebihi PTKP hal ini menyebabkan untuk Pajak Penghasilannya pegawai tersebut tidak wajib melaporkan PPh terutanganya dikarenakan pegawai tersebut belum mempunyai NPWP. Bila pegawai tersebut telah mempunyai NPWP, wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, meskipun statusnya nihil (alias tidak ada pajak yang dibayar/dipotong). Apabila wajib pajak tersebut penghasilannya dibawah PTKP dan diyakinkan tidak akan punya penghasilan lagi (misalkan karena sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi) maka Wajib Pajak tersebut dapat menghapus NPWP-nya.

Tabel 4.2
Perhitungan PPh 21 Tahun 2020
(Sesuai Undang-Undang Pajak)

No	NAMA	STATUS	NPWP	GAJI BRUTO	BIAYA JABATAN	IURAN PENSUN	GAJI SETAHUN	PTKP	PKP	5%	PPh PASAL 21 SEBULAN
1	SYAHRIZAL, SE	K/3	47.536.xx	Rp 15,948,674.65	Rp 500,000.00	Rp 112,559.20	Rp 183,937,385.40	Rp 72,000,000.00	Rp 111,937,000.00	5%	Rp 466,405.00
2	NURIANTO, SE	K/3	47.496.xx	Rp 8,451,127.51	Rp 422,556.37	Rp 114,301.50	Rp 94,971,235.68	Rp 72,000,000.00	Rp 22,971,000.00	5%	Rp 95,713.00
3	HENDRA NOVA	K/0		Rp 5,920,100.98	Rp 296,005.04	Rp 28,902.15	Rp 67,142,325.48	Rp 58,500,000.00	Rp 8,642,000.00	5%	Rp 36,009.00
4	ZAINUDDIN	K/3	47.536.xx	Rp 6,108,543.86	Rp 305,427.19	Rp 68,688.00	Rp 68,813,144.04	Rp 72,000,000.00	Rp 3,186,000.00	20%	-
5	M. PRANATA	K/1		Rp 2,842,424.70	Rp 142,121.23	Rp 14,565.70	Rp 32,228,853.24	Rp 63,000,000.00	Rp 30,771,000.00	20%	-
6	SEPTIAN DWI	K/0		Rp 4,989,100.37	Rp 239,455.01	Rp 75,844.00	Rp 58,959,076.44	Rp 58,500,000.00	Rp 459,000.00	20%	Rp 2,295.00
7	WALUYO	K/2		Rp 2,870,067.54	Rp 143,503.37	Rp 15,455.00	Rp 32,533,310.04	Rp 67,500,000.00	Rp 34,966,000.00	20%	-
8	BONASER, SE	K/3	47.496.xx	Rp 7,547,486.98	Rp 377,374.34	Rp 95,411.85	Rp 84,896,409.48	Rp 72,000,000.00	Rp 12,896,000.00	5%	Rp 53,735.00
9	M. YUSUF	K/1	59.031.xx	Rp 6,234,998.56	Rp 311,749.92	Rp 33,890.25	Rp 70,672,300.68	Rp 63,000,000.00	Rp 7,672,000.00	5%	Rp 31,967.00
10	M. RIDWAN	K/3		Rp 2,783,094.30	Rp 139,154.71	Rp 13,655.75	Rp 31,563,406.08	Rp 72,000,000.00	Rp 40,436,000.00	20%	-
11	BAMBANG N	K/2	47.496.xx	Rp 6,028,915.34	Rp 301,445.76	Rp 68,020.70	Rp 67,913,386.56	Rp 67,500,000.00	Rp 413,000.00	5%	Rp 1,722.00
12	KARIMUDDIN	K/3	67.819.xx	Rp 5,762,771.65	Rp 288,138.58	Rp 50,715.67	Rp 65,087,008.80	Rp 72,000,000.00	Rp 6,912,000.00	20%	-
13	YENNY M	TK		Rp 6,104,453.76	Rp 305,222.68	Rp 90,113.45	Rp 68,509,411.56	Rp 54,000,000.00	Rp 14,509,000.00	5%	Rp 60,455.00
14	ARI K	K/1	89.526.xx	Rp 5,356,270.53	Rp 267,813.52	Rp 35,670.15	Rp 60,633,442.32	Rp 63,000,000.00	Rp 2,366,000.00	20%	-
15	PITRA N	K/0		Rp 2,613,209.30	Rp 130,660.46	Rp 13,455.00	Rp 29,629,126.08	Rp 58,500,000.00	Rp 28,870,000.00	20%	-
16	SATRIA S	K/3	47.496.xx	Rp 7,274,774.86	Rp 363,738.74	Rp 82,765.42	Rp 81,939,248.40	Rp 72,000,000.00	Rp 9,939,000.00	5%	Rp 41,413.00
17	FATHOLOSA L	K/0	47.536.xx	Rp 5,674,987.45	Rp 283,749.37	Rp 68,580.55	Rp 63,871,890.36	Rp 58,500,000.00	Rp 5,371,000.00	5%	Rp 22,382.00
18	EFRIZAL	K/1	47.536.xx	Rp 5,923,964.20	Rp 296,198.21	Rp 68,770.00	Rp 66,707,951.88	Rp 63,000,000.00	Rp 3,707,000.00	5%	Rp 15,449.00
19	NENNY TRIANA	TK	47.536.xx	Rp 5,675,633.65	Rp 283,781.68	Rp 61,815.35	Rp 63,960,439.44	Rp 54,000,000.00	Rp 9,960,000.00	5%	Rp 41,501.00
20	SARIANI SH	K/1	47.496.xx	Rp 6,243,908.67	Rp 312,195.43	Rp 85,150.55	Rp 70,158,752.28	Rp 63,000,000.00	Rp 7,158,000.00	5%	Rp 29,828.00

Sumber Data: Perhitungan Pemotongan PT. Bhanda Ghara Rekse (Persero) Divre I Medan Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008.

Contoh 1 Perhitungan gaji karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP menurut PT. Bhanda Ghara Reks (Persero) Divre I Medan dan menurut Undang-Undang Pajak Pegawai Henda Nova bekerja di PT. Bhanda Ghara Rekse (Persero) Divre I Medan sebagai karyawan tetap dengan status K/0 memperoleh gaji Rp 67.142.324.90 setahun.

Besarnya pajak yang dibayar adalah:

Sesuai Undang-Undang Pajak dengan tarif PTKP terbaru tahun 2016

Penghasilan Netto Setahun

PTKP K/0

PKP Setahun

Dibulatkan Rp 8.642.000.00

PPh 21 Terutang

$(5\% \times 120\% \times 8.642.000.00) = \text{Rp } 518.520.00$

PPh 21 Sebulan $\text{Rp } 518.520.00/12 = 43.210.00$

Contoh 2

Gaji Sebulan		Rp 15.948.674.75
Biaya Jabatan	Rp 500.000.00	
Iuran Pensiun	<u>Rp 112.559.20+</u>	
Jumlah		<u>Rp 612.55920</u>
Gaji Netto Sebulan		Rp 15.336.115.55
Penghasilan Netto Setahun 12 x Rp 15.336.115.55		Rp 184.033.386.60
PTKP		
Wajib Pajak	Rp 54.000.000.00	
Istri	Rp 4.500.000.00	
Anak K/3	<u>Rp 13.500.000.00+</u>	
Jumlah PTKP		<u>(Rp 72.000.000.00)</u>
PKP		Rp 112.033.000.00
PPh Pasal 21 Terutang		
$5\% \times 50.000.000.00 = \text{Rp } 2.500.000.00$		
$15\% \times 62.033.000.00 = \text{Rp } 9.304.950.00+$		
$= \text{Rp } 11.804.950.00$		
PPh Pasal 21 Sebulan $\text{Rp } 11.804.950.00/12 = \text{Rp } 983.745.00$		

Contoh 3

Perhitungan Menurut Undang-Undang

Penghasilan Netto Setahun	Rp 31.563.402.50
PTKP K/3	<u>(Rp 72.000.000.00)</u>
PKP	(Rp 40.436.597.50)
Pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh	Rp 40.436.000.00

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pegawai atas nama M Ridwan penghasilannya tidak melebihi PTKP. Hal ini menyebabkan untuk pajak penghasilannya pegawai tersebut tidak wajib melaporkan PPh terutangnya dikarenakan pegawai tersebut belum mempunyai NPWP. Bila pegawai tersebut telah mempunyai NPWP, wajib pajak tersebut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, meskipun statusnya nihil (alias tidak ada pajak yang dibayar atau dipotong). Perhitungan pajak diatas telah sesuai dengan

Undang-Undang PTKP terbaru yaitu PMK Nomor 101/PMK.010/2016, dan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) besarnya tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% dari pada tariff yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak terbaru menurut PMK-101/PMK/010/2016 yang dipakai dalam pengisian SPT masa/Tahunan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan orang pribadi adalah:³⁰

Tabel 4.3
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Tarif PTKP Tahun 2015	Tarif PTKP Tahun 2016
TK/0	36.000.000	54.000.000
TK/1	39.000.000	58.500.000
TK/2	42.000.000	63.000.000
TK/3	45.000.000	67.500.000
K/0	39.000.000	58.500.000
K/1	42.000.000	63.000.000
K/2	45.000.000	67.500.000
K/3	48.000.000	72.000.000
K/1/0	75.000.000	112.000.000
K/1/1	78.000.000	117.000.000
K/1/2	81.000.000	121.500.000
K/1/3	84.000.000	126.000.000

³⁰ Hasibuan. M, *Analisis Penerapan dan Perbandingan Perhitungan PPh 21 Atas Tunjangan Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008*.

Keterangan :

1. TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
2. TK/1 : Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
3. TK/2 : Tidak Kawin dan Dua Tanggungan
4. TK/3 : Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan
5. K/0 : Kawin Tidak Ada Tanggungan
6. K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan
7. K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
8. K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
9. K/1/0 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Tanpa Tanggungan
10. K/1/1 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Satu Tanggungan
11. K/1/2 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Dua Tanggungan
12. K/1/3 : Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dan Tiga Tanggungan

B. Pembahasan

1. Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

a) Perhitungan PPh 21 PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan perusahaan tidak menggunakan tariff PPh Pasal 21 bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP dalam perhitungan pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan tetap, sedangkan yang digunakan oleh perusahaan adalah tarif PPh Pasal 21 bagi karyawan yang sudah mempunyai NPWP pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. Hal

ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, apabila terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat. Tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib Pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

**b) Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Bhandha Ghara Rekha (Persero)
Divre I Medan**

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempetanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan

kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang kurang bayar pada setiap karyawan tetap PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan hal ini disebabkan karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pension yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pension, dan Penghasilan Kena Pajak dan tarif PPh Psal 21 bagi pegawai yang belum mempunyai NPWP tidak boleh disamakan bagi pegawai yang sudah mempunyai NPWP, apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan dalam pembulatan kedalam ribuan rupiah penuh untuk Penghasilan Kena Pajak maupun PPh Pasal 21 tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan wajib pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding System. Withholding System adalah suatu system pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pihak PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan.

c) Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Divre I Medan

Perusahaan telah menetapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan yang masih kurang bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahaan selalu terlambat dari tanggal menurut UU No 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Batas waktu pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Divre I Medan tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan pajak penghasilan 21. Hal tersebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT. Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami kesalahan. Sehingga perusahaan-perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 kepada pegawainya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan terjadi perbedaan dalam perhitungan tarif PPh bagi yang sudah mempunyai NPWP maupun yang belum mempunyai NPWP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan dan menerapkan perhitungan pemotongan sesuai dengan perhitungan perusahaan atau bisa dikatakan tidak menggunakan tarif PPh Pasal 21 dan Penghasilan Kena Pajak yang harus dibulatkan kedalam ribuan rupiah penuh dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 atau perturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka pemotongan/pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukkan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran yang penulis tujukan untuk perusahaan :

1. Sebaiknya Perusahaan harus mengikuti peraturan perundang-undangan Peprajakan pada Nomor 36 Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Perusahaan harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang
3. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda karyawan yang tidak memiliki NPWP dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi Wajib Pajak itu sendiri.

4. Perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 21 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada Nomor 36 Tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 21 yang dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita, *Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ahmadi, Nur, *Metode Penelitian*, Medan: FEBI UINSU Press, 2016.
- Bustamar, Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dalimunthe. Bastari. Januri, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Medan: Publishing, 2015.
- Dalughu, Meyliza, *Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No. 03, 2015.
- Hafidbuddhin, Didin, *Zakat Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahap Isnaini & M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economic*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2016.
- Januri, dkk, *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Madenatera, 2020.
- Lydia Christiana, *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan, Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. X*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol 9 No. 1a, 2017.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Jakarta: Andi Offset, 2018.
- Martani, Dwi, dkk, *Akuntansi keuangan Menengah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016.
- Nusa, Yahya, *Analisis perhitungan, pemotongan dan pemahaman tentang pph pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic Operation Support*. Jurnal Ulet Vol. 1 No. 02, 2017.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pranoto, dkk, *Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak*, Jurnal Reformasi Birokrasi. Vol. 5 No. 02, 2016.
- Putra, Indra Mahardika, *Pengantar Komplet Akuntansi dan Perpajakan*, Yogyakarta: Quadrant, 2019.

- Purwono, Herry, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta:Erlangga, 2010
- Rangkuti, Indra Effendi, dkk, *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Medan: Madenatera, 2019.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori & Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Siregar, F, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Karya Natal* Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 01, 2015.
- Syakur, Ahmad, *Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hisbut Tahrir)*. Jurnal Universum. Vol. 9 No. 01, 2015.
- TMBooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Tonny Ayub Satrio, Pranoto, *Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Negara dari Sektor Pajak*. Jurnal Reformasi Birokrasi, Vol 5 No. 02, 2016.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.